

# **EKSEKUSI PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh**

**Munajat Intansasmita**

**Komisi Pembimbing**

**Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. dan Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H.**

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya  
Jalan MT. Haryono No.169 Malang, Jawa Timur, Indonesia  
Email: muna\_tantan@yahoo.com

## ***Abstract***

*Journal writing is motivated three problems. First, juridical issues in Article 20, paragraph 7 of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication vacancy occurs on setting norms fined execution against the corporation. Second, theoretical issues, arrangements regarding the execution of criminal penalties against the corporation in corruption must be set for legal certainty in the implementation. Third, is the sociological problems can not be taken or executed by the prosecution as the executor of the corporation. The purpose of writing this paper to investigate the implementation of the rules of criminal penalties against the corporation and outlines the execution arrangements criminal penalties against the corporation in corruption that ensure legal certainty. Writing this journal using normative legal research methods. Legal issues in regulating the imposition of criminal penalties against the corporation in the Act PTPK currently divided into two legal issues: First, Juridical Issues, PTPK Act and the Criminal Code does not regulate the execution of criminal penalties against the corporation in corruption. Second, Sociological Problems, that the exclusion of the execution of criminal penalties against corporate corruption resulted in the corporation had no intention of carrying out criminal penalties. After conducting comparative legal system of the European Continental (Thailand, Yugoslavia, the Netherlands and Germany) and the legal system of the Anglo-Saxon (US and UK), arose the concept of the ideal, which is the first stage: Corporations can pay criminal fines in installments, during the implementation process of the lasted for a while corporations closure until the payment process is completed; Stage Two: If the corporation does not carry out the penalty payment so law enforcement can be executed in the form of deprivation of the wealth of the proceeds of corruption; Stage Three: The corporation may be liquidated.*

**Key words:** *execution of criminal fines, corporations, corruption*

## Abstrak

Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi tiga permasalahan. *Pertama*, permasalahan yuridis dalam Pasal 20 ayat 7 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terjadi kekosongan norma mengenai pengaturan eksekusi pidana denda terhadap korporasi. *Kedua*, permasalahan teoritis, pengaturan mengenai eksekusi pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi harus diatur agar adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya. *Ketiga*, permasalahan sosiologisnya adalah tidak dapat dilakukan tindakan atau eksekusi oleh pihak Kejaksaan selaku eksekutor terhadap korporasi. Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui pelaksanaan aturan pidana denda terhadap korporasi dan menguraikan mengenai pengaturan eksekusi pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi yang menjamin kepastian hukum. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Permasalahan hukum dalam pengaturan penjatuhan pidana denda terhadap korporasi dalam UU PTPK saat ini terbagi dalam dua permasalahan hukum: *Pertama*, Permasalahan Yuridis, UU PTPK dan KUHP tidak mengatur eksekusi pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. *Kedua*, Permasalahan Sosiologis, tidak diaturnya eksekusi pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi mengakibatkan korporasi memiliki niat tidak melaksanakan pidana denda. Setelah melakukan perbandingan Sistem hukum Eropa Kontinental (Thailand, Yugoslavia, Belanda dan Jerman) dan sistem hukum Anglo Saxon (Amerika Serikat dan Inggris), muncullah konsep ideal, yaitu tahap pertama: Korporasi dapat melakukan pembayaran pidana denda dengan cara mencicil, selama proses pelaksanaan tersebut berlangsung untuk sementara waktu korporasi dilakukan penutupan sampai proses pembayaran selesai; Tahap Kedua: Apabila korporasi tidak melaksanakan pembayaran pidana denda maka penegak hukum dapat melakukan eksekusi berupa perampasan terhadap harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi; Tahap Ketiga: Korporasi dapat dilikuidasi.

**Kata kunci:** eksekusi pidana denda, korporasi, tindak pidana korupsi

## Latar belakang

Globalisasi dan modernisasi juga mengakibatkan kejahatan-kejahatan semakin berkembang, seperti yang saat ini sering terjadi yaitu Tindak Pidana Korupsi yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana Korupsi merupakan pengembangan dari Tindak Pidana Pencurian namun perbedaannya yaitu Korupsi, obyek yang diambil adalah uang milik Negara sedangkan pencurian bukan aset milik Negara. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih atau *white collar crime*. Selain bentuk kejahatannya yang semakin berkembang, subyek hukumnya pun bertambah yaitu korporasi juga dapat melakukan tindak pidana.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan data dari IACF (Indonesia Anti Corruption Forum ) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) kasus yang telah diputus oleh Pengadilan maupun Mahkamah Agung, diantaranya yaitu:

1. Kasus korupsi yang dilakukan oleh PT. Giri Jaladhi Wana di Banjarmasin, kasus korupsi yang dilakukan oleh korporasi ini berawal dari putusan empat terdakwa sebelumnya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin. Keempat terdakwa tersebut yaitu Direktur Utama PT Giri, Stephanus Widagdo, Direktur PT Giri Bonafacius Tjiptomo Subekti, mantan Walikota Banjarmasin Midfai Yabani, dan Kepala Dinas Pasar Kota Banjarmasin Edwan Nizar. Berdasarkan kontrak yang ditandatangani tersebut, PT Giri dianggap sebagai pihak yang wajib diminta pertanggungjawaban pidana karena menikmati keuntungan dari pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari. Pada saat menjadi pasar tradisional, awalnya Pemkot Banjarmasin menerima hasil retribusi Pasar Sentra Antasari sebesar Rp800 juta setiap tahunnya. Akan tetapi, setelah dibangun menjadi pasar modern, Pemkot Banjarmasin justru kehilangan uang hasil dari pengelolaan Pasar Sentra Antasari yang dikelola PT Giri. PT Giri yang ditunjuk sebagai pengelola Pasar Sentra Antasari mulai tahun 2004 sampai 2007, telah terbukti tidak pernah membayar uang pengelolaan kepada Kas Daerah Pemkot Banjarmasin. Berdasarkan laporan keuangan pengelolaan Pasar Sentra Antasari, jumlah uang yang tidak diserahkan

yaitu sebesar Rp7,6 miliar dari tahun 2004 sampai 2007. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin<sup>1</sup> dan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin<sup>2</sup>. Pengadilan Tinggi Banjarmasin memberikan pidana denda Rp. 1,3 miliar serta pidana tambahan berupa penutupan sementara PT Giri selama enam bulan. Putusan banding tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Juni 2011. “Masalahnya, terdapat eksekusi yang belum diselesaikan. Untuk Rp1,3 miliar sudah dieksekusi dengan mekanisme surat penagihan. Mereka mengatakan dapat membayar, tetapi hanya formal di atas kertas. Nyatanya, dari Rp1,3 miliar belum dilaksanakan pembayaran.

2. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Asian Agri Group, namun dalam kasus ini Putusan MA Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 tidak memutus korporasinya melainkan menjatuhkan sanksi kepada para pengurusnya.
3. Kasus Korupsi yang dilakukan oleh PT. IM2 dan Indosat, dalam kasus ini hanya menjatuhkan sanksi kepada mantan Direktur Utama PT IM2.

Korupsi menjadi masalah besar di dunia, seperti halnya merupakan masalah yang sedang dihadapi Indonesia. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini tidak hanya dilakukan oleh subyek hukum manusia namun dilakukan oleh subyek hukum korporasi sehingga mendapat sorotan dan prioritas utama dari berbagai pihak. Dimana perbuatannya selalu mengalami perubahan dalam modus operandinya dari segala sisi, korupsi merupakan kejahatan yang rumit dan sulit dibuktikan, baik dikarenakan modus operandinya maupun bentuk profesionalitas pelakunya, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pendekatan terhadap pemberantasannya. Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi diharapkan dapat memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan hukuman pidana yang adil dan setimpal dengan

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung, **Pidana\_04\_PID.SUS\_2011\_PT.\_BJM\_(PENGADILAN\_TIPIKOR)**, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/973122044ba228dabf030c2e7eb128a3>, diakses 10 Maret 2015 pukul 20.23 WIB.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung, **812/PID\_SUS/2010/PN.BJM**, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9918b5c5a0328019072a212e01279748>, diakses 10 Maret 2015 pukul 20.30 WIB.

perbuatannya. Tujuan kedua adalah agar kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dikembalikan semaksimal mungkin.<sup>3</sup>

Salah satu unsur tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Terhadap kerugian keuangan tersebut, Negara membuat undang-undang anti korupsi, baik yang lama yaitu UU No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana didalamnya telah terdapat kebijakan yang mengatur tentang kerugian keuangan Negara itu harus diganti atau dikembalikan oleh pelaku korupsi.

Selain tidak diaturnya mengenai tindak pidana korupsi dalam KUHP, didapati pula mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang tidak diatur. KUHP merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*) sehingga dalam hal mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana agak tertinggal dibandingkan negara-negara *Common law*. Pertanggungjawaban korporasi di negara-negara *Common law* seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Canada sudah dimulai sejak revolusi industry. Pada tahun 1842, Pengadilan Inggris menjatuhkan pidana denda kepada korporasi karena kegagalannya dalam memenuhi suatu kewajiban hukum.<sup>4</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut telah disikapi oleh para pembuat undang-undang untuk mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang diatur diluar KUHP maka lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencucian Uang.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-

---

<sup>3</sup> Harprileny Soebiantoro, **Eksistensi Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Media Hukum, Jakarta, 2004, hlm. 9.

<sup>4</sup> Muladi, **Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana**, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, 1999, hlm. 2.

Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal 20 ayat 7, sanksi pidana yang ditujukan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi adalah pidana denda. Namun dalam bunyi pasal tersebut tidak menyebutkan mengenai pelaksanaan dari pidana denda tersebut seperti tidak adanya pidana alternatif terhadap korporasi yang tidak melaksanakan pidana denda sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan menyebabkan adanya kekosongan hukum. Hal ini menjadi kendala bagi Jaksa selaku pelaksana dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Hal ini berbeda halnya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang lebih rinci dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Tentunya masalah tersebut sangat disayangkan, dimana saat ini aparat penegak hukum yang saat ini bersemangat untuk memberantas masalah korupsi justru harus membiarkan kasus korupsi yang dilakukan korporasi akibat dari tidak diatur secara rincinya di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. terdapat beberapa masalah dalam penerapannya khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh penulis dituangkan dalam makalah ini dengan judul **“Eksekusi Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum”**. Judul tersebut mencakup rumusan masalah pertama yang hendak dianalisis oleh penulis yaitu apakah permasalahan hukum dalam pengaturan penjatuhan pidana denda terhadap korporasi yang menjamin kepastian hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini. Kemudian dilanjutkan pada rumusan masalah kedua yaitu penulis menganalisa tentang konsep pengaturan penjatuhan pidana denda terhadap korporasi yang menjamin aspek kepastian hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di masa mendatang.

Penulisan jurnal hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal dan kasus-kasus hukum terkait penelitian, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia. Bahan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan tema permasalahan yang telah dikemukakan kemudian dikaji secara mendalam.

## **Pembahasan**

### **A. Permasalahan Hukum Dalam Pengaturan Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Korporasi Yang Menjamin Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Saat Ini**

Penerapan sanksi pidana denda terhadap korporasi dalam Tindak pidana korupsi sangat jarang dijatuhkan oleh hakim, akibatnya korporasi-korporasi yang saat ini sebenarnya terindikasi telah melakukan tindak pidana korupsi, masih bisa bernafas lega. Tentunya didalam pengaturan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pihak legislatif terdapat permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi sulitnya menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Apabila permasalahan-permasalahan ini dibiarkan secara terus-menerus maka akan sangat merugikan keuangan Negara.

Permasalahan-permasalahan hukum dalam pengaturan pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi yaitu:

#### **1. Permasalahan Yuridis**

Permasalahan terhadap pelaksanaan pidana denda dipengaruhi oleh adanya suatu daya paksa dari suatu peraturan perundang-undangan atau dapat disebut dengan permasalahan yuridis. Permasalahan yuridis adalah permasalahan yang muncul terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

##### **a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

KUHP merupakan undang-undang pokok yang mengatur mengenai tindak pidana yang ada di Indonesia. KUHP ini masih merupakan warisan dari Kolonial Belanda

sehingga macam-macam tindak pidananya pun masih merupakan tindak pidana konvensional. Selain itu subyek hukum dalam KUHP hanya berlaku terhadap orang atau manusia. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 30 ayat 2 KUHP<sup>5</sup>, sistem hukum pidana Indonesia tidak memungkinkan untuk menjatuhkan pidana denda kepada subyek hukum korporasi. Dalam salah satu isi pasal tersebut menyebutkan bahwa alternatif dari sanksi pidana denda yang tidak dibayar yaitu berupa sanksi pidana kurungan.

Perkembangan mengenai kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana mengalami perkembangan 3 (tiga) tahap:

#### 1) Tahap Pertama

Pada tahap ini pelaku tindak pidana adalah orang atau manusia dan pandangan ini yang saat ini masih dianut oleh KUHP. Pandangan ini dipengaruhi oleh asas *societas delinquere non potest*, yakni badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Maksudnya adalah apabila dalam suatu perkumpulan (korporasi) terjadi tindak pidana maka dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.

Tahapan tersebut merupakan dasar dari Pasal 59 KUHP<sup>6</sup> atau Pasal 51 W.v.S. Belanda. Dari ketentuan tersebut maka terlihat bahwa para penyusun KUHP dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*” atau universitas *delinquere non potest*. Menurut Enschede ketentuan ini adalah contoh khas dari pemikiran secara dogmatis dari abad ke- 19.

#### 2) Tahap Kedua

Tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dipertanggungjawabkan secara pidana yaitu para pengurusnya dan asalkan diatur dengan tegas dalam peraturan itu.<sup>7</sup>

#### 3) Tahap Ketiga

---

<sup>5</sup> Pasal 30 ayat 2 KUHP: “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”.

<sup>6</sup> Pasal 59 KUHP: “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”.

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro, **Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi, Kertas kerja pada Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi**, di FH Unair, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 52.



Tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut dan meminta pertanggungjawaban korporasi menurut hukum pidana. Alasannya antara lain karena misalnya dalam tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang didapat korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak mungkin seimbang apabila pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja.

Alasan lainnya bahwa dengan hanya memidana para pengurus saja belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulang tindak pidana tersebut. Memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang berlaku.<sup>8</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korporasi sebagai subyek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara langsung hanya terbatas dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP.

**b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 merupakan peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengatur terhadap subyek hukum pidana Korporasi. Dalam UU ini, mengatur terhadap 2 (dua) subyek hukum pidana yaitu subyek hukum pidana orang atau manusia dan subyek hukum pidana korporasi. Hal ini diatur dalam pasal 1 butir 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi<sup>9</sup>.

Dalam UU PTPK, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, artinya hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi maka hakim yang ingin menjatuhkan pidana terhadap

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

korporasi tidak memiliki alternatif lain selain pidana denda itu sendiri.<sup>10</sup> Hal ini diatur dalam pasal 20 ayat 7 UU PTPK.<sup>11</sup> Dalam ketentuan pasal tersebut mempunyai konsekuensi yang sama dengan sanksi yang dirumuskan tunggal, karena tidak ada alternatif lain yang dapat dipilih. Sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan yaitu apabila pidana denda itu tidak dibayar oleh korporasi tidak ada tindakan alternatif yang digunakan. Selain itu dalam UU PTPK tidak ada aturan pelaksanaannya sehingga apabila dalam undang-undang tindak pidana khusus tidak diatur dengan jelas maka sesuai ketentuan pasal 103 KUHP harus merujuk kembali terhadap ketentuan KUHP.

Apabila pidana denda dijatuhkan kepada subyek hukum orang tentunya tidak akan menimbulkan permasalahan, karena dalam pasal 30 ayat 2 KUHP mengatur mengenai apabila pidana denda tidak dibayar, yaitu akan dikenai pidana kurungan pengganti denda.

Akibat dari kurang tegas dan tidak jelasnya pengaturan mengenai pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi membuat hakim dan jaksa kesulitan untuk memberantas korupsi yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan yang diatur dalam UU PTPK, oleh karena itu diperlukan aturan pelaksana yang mengatur mengenai pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

## **2. Permasalahan Sosiologis**

Permasalahan mengenai pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi tidak hanya terkendala masalah yuridis saja melainkan juga terkendala masalah sosiologis. Permasalahan tersebut didasarkan atas jaranganya hakim menerapkan pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Adapun permasalahan-permasalahan sosiologis dari pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi dalam

---

<sup>10</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. Hakim tidak berwenang menjatuhkan hukuman/putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP, Soenarto Soerodibroto, **KUHP & KUHP**, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hlm. 16.

<sup>11</sup> Pasal 20 ayat 7 UU PTPK:

“Pidana pokok yang dapat digunakan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)”.

tindak pidana korupsi, yaitu tidak adanya niat dari korporasi untuk melaksanakan pidana denda.

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi korporasi tidak melaksanakan pidana denda dalam tindak pidana korupsi diantaranya yaitu korporasi tersebut yang diwakili oleh pengurus telah mengetahui kelemahan dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu tidak diatur secara tegas dan rincinya mengenai suatu korporasi yang tidak melaksanakan pidana denda.

Selanjutnya alasan dari korporasi tidak melaksanakan pidana denda dalam tindak pidana korupsi adalah tidak mencukupinya harta kekayaan yang dimiliki oleh suatu korporasi untuk membayar denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Dari kedua alasan tersebut terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh korporasi yaitu PT. Giri Jaladhi Wana (PT. Girir) dan telah ditetapkan bersalah oleh pengadilan negeri Banjarmasin selain korporasai yang ditetapkan menjadi terdakwa terdapat pula empat terdakwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negari Banjarmasin, yaitu Direktur Utama PT Giri, Stephanus Widagdo, Direktur PT Giri Bonafacius Tjiptomo Subekti, mantan Walikota Banjarmasin Midfai Yabani, serta Kepala Dinas Pasar Kota Banjarmasin Edwan Nizar. Berdasarkan kontrak kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diwakili oleh Walikota Banjarmasin dan PT. Giri yang telah ditandatangani. PT Giri dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab secara pidana karena telah menikmati keuntungan dari pembangunan serta pengelolaan Pasar Sentra Antasari. Saat Pasar Sentra Antasari menjadi pasar tradisional, awalnya Pemerintah kota Banjarmasin menerima hasil retribusi Pasar Sentra Antasari sebesar Rp800 juta setiap tahunnya namun setelah menjadi pasar modern, Pemerintah kota Banjarmasin justru kehilangan uang hasil dari pengelolaan Pasar Sentra Antasari yang dikelola PT Giri. PT Giri yang sudah ditunjuk sebagai pengelola Pasar Sentra Antasari sejak tahun 2004 hingga tahun 2007 sebesar 7,6 Milyar, terbukti tidak pernah memberikan uang dari hasil pengelolaan kepada Kas Daerah Pemerintah kota Banjarmasin. Berdasarkan laporan keuangan pengelolaan Pasar Sentra Antasari. Hal ini terbukti dengan dijatuhkannya Putusan

Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pengadilan Tinggi Banjarmasin menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Juni 2011 dengan menjatuhkan pidana denda Rp1,3 miliar dan pidana tambahan yaitu berupa penutupan sementara PT Giri selama enam bulan. “Masalahnya, untuk eksekusi pidana denda sebesar 1,3 Milyar belum dilaksanakan meskipun sudah sesuai mekanisme dengan dikeluarkannya surat penagihan dan pihak PT. Giri mengatakan dapat membayar, namun hanya formal di atas kertas saja. Dan hingga saat ini belum melaksanakan pembayaran.

Dari kasus diatas tentunya merupakan permasalahan yang sangat serius dan sangat merugikan keuangan Negara. Apabila dibiarkan secara terus menerus maka penegakan hukum terhadap korporasi akan menjadi sia-sia dan korporasi beserta pihak-pihak tertentu akan memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Apabila dibandingkan dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian disebut UU PPTPPU juga mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi serta sanksi pidana pokoknya yaitu pidana denda, namun dalam UU PPTPPU mengatur lebih rinci mengenai korporasi yang tidak melaksanakan pidana sehingga lebih jelas dalam pengaturan sanksi pidananya dan pelaksanaannya juga lebih mudah dilakukan oleh hakim dan jaksa. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 dan pasal 9 ayat UU PPTPPU<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Pasal 7 ayat 1 UU PPTPPU :

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 9 ayat 1 UU PPTPPU :

(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.  
(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Oleh karena itu pemerintah melalui legislatif harus segera melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan PTPK agar korporasi dapat dijerat sanksi pidana dan merasa jera untuk tidak melakukan kembali tindak pidana korupsi.

## **2. Konsep Pengaturan Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Korporasi Yang Menjamin Aspek Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Massa Mendatang**

Penjatuhan pidana terhadap korporasi meskipun sering terkait masalah finansial namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh. Menurut Suzuki, Penjatuhan pidana korporasi dalam bentuk penutupan seluruh atau sebagian usaha dilakukan secara hati-hati. Apabila tidak dilakukan secara hati-hati akan menimbulkan dampak yang sangat luas dan akan memberikan dampak terhadap orang-orang yang tidak bersalah, seperti buruh. Memberikan asuransi kepada buruh/ pekerja adalah cara yang tepat untuk mencegah dampak negatif dari penjatuhan pidana terhadap korporasi. Di berbagai Negara, untuk memnutut dan menjatuhkan pidana terhadap korporasi biasanya dianut bipunishment provisions yang berarti baik pelaku (pengurus) maupun korporasi dapat dijadikan subyek tindak pidana.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki UU PTPK dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam UU PTPK diatur mengenai pidana pokok terhadap korporasi yaitu pidana denda yang diatur dalam Pasal 20 ayat (7), namun dalam pelaksanaannya hakim dan jaksa sulit untuk menerapkan pasal tersebut karena tidak adanya aturan pelaksana terhadap aturan yang mengatur korporasi yang tidak melaksanakan pidana, dalam UUPTPK hanya terdapat pidana tambahan yang diatur dalam pasal 18 ayat 1<sup>13</sup> namun pidana tambahan ini

---

<sup>13</sup> Pasal 18 ayat (1) UU PTPK:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

tidak dapat dijadikan pidana alternatif apabila pidana pokok tidak dilaksanakan oleh korporasi.

Oleh karena itu, penulis akan memberikan gambaran bagaimana pengaturan pidana terhadap korporasi di beberapa Negara, diantaranya yaitu:

### **1. Pengaturan pidana korporasi di Negara Eropa Kontinental.**

Pada saat KUHP Belanda disahkan tahun 1886, pihak legislatif berpendapat tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang/ manusia saja. Pemahaman ini dipengaruhi oleh Von Feurbach dan Von Savigny dari Jerman. Pada tahun 1951 terdapat undang-undang baru yang disahkan dan memiliki tujuan untuk mengunifikasi semua peraturan pemerintah tentang investugasi, penutupan serta penjatuhan hukum dalam kejahatan ekonomi.

Dalam pasal 15 EOA, kejahatan ekonomi dapat dilakukan oleh badan hukum serta dapat dihukum. Namun pada tahun 1976 aturan tersebut dicabut dan diatur dalam Pasal 51 KUHP (WvS Belanda)<sup>14</sup>, dan hingga saat ini menjadi dasar mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Belanda.

Dalam pasal 51 ayat (2) memperluas kemungkinan untuk *secondary liability* dan mengatur mengenai manusia dan badan hukum yang melakukan kejahatan sedangkan orang yang mengontrol kejahatan tersebut. *Secondary liability* maksudnya adalah tidak hanya terbatas pada para pekerja yang memegang posisi ataupun yang sebenarnya tidak memegang suatu jabatan tapi bertindak seakan-akan pemegang

- 
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

<sup>14</sup> Pasal 51 KUHP Belanda:

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
2. Apabila suatu tindak pidana dilaksanakan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap:
  - a. Badan hukum atau;
  - b. Terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan yang dilarang itu, atau
  - c. Terhadap yang disebutkan di dalam a dan b bersama-sama.
3. Bagi pemakaian ayat sebelumnya disamakan dengan badan hukum: perseroan tanpa hak badan hukum, perserikatan dan yayasan.

jabatan. Aturan tersebut memperluas kemungkinan bahwa pegawai yang tidak memiliki kewenangan dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana.<sup>15</sup>

Dengan adanya undang-undang tersebut maka semua peraturan perundang-undangan pidana khusus yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dicabut karena dianggap sudah tidak perlukan lagi.

Mahkamah Agung Belanda membuat aturan pada tahun 2003 mengenai korporasi yang bertanggung jawab atas suatu kejahatan. Menurut pihak Mahkamah Agung Belanda, penyebab dari pertanggungjawaban pidana dalam setiap peristiwa adalah perbuatan terlarang yang dikategorikan sebagai *reasonable* (masuk akal). Pihak Mahkamah Agung membuat prinsip dasar tersebut bahwa perbuatan yang dianggap melanggar hukum pidana dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi apabila perbuatannya berada pada ruang lingkup dari suatu korporasi. Ruang lingkup dari korporasi yaitu:<sup>16</sup>

1. Perbuatannya dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak oleh pegawai perusahaan, dalam delegasi lewat kontrak pekerja maupun tidak;
2. Perbuatannya dianggap sesuai dengan kegiatan sehari-hari dari korporasi;
3. Korporasi mendapat keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan;
4. Perbuatannya disembunyikan atau bahkan dibuang oleh korporasi, serta perbuatannya telah disetujui korporasi.

Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada korporasi menurut KUHP Belanda tidak mempunyai bagian khusus mengatur hukuman terhadap korporasi. Hukuman yang diberikan kepada korporasi hanya pidana denda. Adapun ketentuan yang dianut di Belanda tentang jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap korporasi, yaitu adanya jenis sanksi berupa tindakan adalah "*Penyitaan barang dan perampasan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum (confiscation and deprivation of the un lawfully obtained gains)* – Pasal 36 a- f." Berdasarkan KUHP Belanda, ditetapkan mengenai aturan batas waktu pembayaran denda yaitu sekurang-

---

<sup>15</sup> B.F Keulen dan E. Gritter, **Corporate Criminal Liability in Netherlands**, <http://www.ejcl.org/143/art143-9.pdf>, diakses 11 Agustus 2015 pukul 19.25 WIB.

<sup>16</sup> *Ibid.*

kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan; dan jangka waktu keseluruhannya tidak boleh lebih dari 2 tahun (Pasal 24 a).

Selain Belanda, di Jerman berkembang suatu teori untuk memidana badan hukum yang berasal dari Schunemann yang menurutnya badan hukum tidak mungkin dinyatakan bersalah dan namun pemidanaannya tetap dapat dilakukan. Menurut pendapatnya Schuldgrundsatz dapat digantikan oleh prinsip lainnya yaitu Rechtsguternotstand yang berarti bilamana terdapat kemungkinan objek-objek hukum penting yang terancam dan perlindungannya hanya dapat diberikan dengan cara menjatuhkan pidana pada badan hukum. Pembayaran denda di Jerman diatur dalam KUHP Jerman dan pembayarannya dikenakan berdasarkan perhitungan harian, jumlahnya minimal 5 unit denda harian, kecuali ditentukan lain oleh UU dan tidak lebih dari 360 unit denda harian. Jumlah penghitungannya akan ditentukan oleh pengadilan dengan memperhatikan keadaan ekonomi pelanggar. (Pasal 40)

Terdapat negara-negara Eropa continental yang ketentuan pidananya sama seperti yang dilakukan Belanda dan Jerman, yaitu Yugoslavia berdasarkan KUHPnya menentukan batas waktu pembayaran denda minimal 15 hari dan maksimal 3 bulan tetapi untuk kasus tertentu denda dapat dicicil hingga batas waktu 2 tahun (Pasal 37 ayat 2), Korea dalam KUHPnya menentukan pembayaran pidana denda dan denda ringan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengadilan menjatuhkan putusan (Pasal 29).

Dari ketentuan-ketentuan yang dilakukan di Negara-negara yang menganut system hukum Eropa Kontinental menyatakan bahwa system pembayaran yang diterapkan untuk menjerat korporasi dalam melakukan tindak pidana yaitu dengan cara mencicil pembayaran pidana denda dengan waktu yang telah ditentukan sehingga memberikan kepastian kepada pelaku (korporasi) memenuhi kewajibannya dan memberikan kepastian juga kepada jaksa selaku eksekutor apabila pelaku tidak membayar/ belum membayar untuk melaksanakan upaya paksa berupa pengambilan pembayaran denda dari kekayaan atau pendapatan yang dimiliki pelaku.



## 2. Pengaturan Pidana Korporasi di Negara-Negara Anglo Saxon

Pada Negara-negara anglo saxon, pengaturan pidana korporasi di Amerika Serikat mengacu pada Model Penal Code (model hukum pidana), Official Draft and Explanatory Notes, yang dikeluarkan pada tahun 1985 oleh The American Law Institutes. Pada tahun 1909 dalam kasus *New York Central and H.R.R v. United States*, korporasi sudah diterima sebagai subyek hukum pidana. Pada Pengadilan Negara bagian New York menggunakan doktrin *respondeat superior*, yaitu bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawaban apabila salah satu pegawainya melakukan kejahatan dalam lingkup pekerjaannya dan kejahatan tersebut dilakukan demi keuntungan korporasi. Seluruh aturan dalam hukum pidana mengatur mengenai subyek hukum pidana orang ikut berlaku juga terhadap korporasi sehingga mendapat tekanan dari para jaksa di Amerika Serikat. Korporasi bisa dihukum karena telah melakukan tindak pidana umum, termasuk penipuan, pencucian uang, serta tindakan lain seperti kejahatan kerah putih atau *White Collar Crime*.<sup>17</sup>

Amerika Serikat memiliki 2 (dua) hukum yang berlaku untuk hukum pidana, yaitu pada tingkat Negara bagian dan tingkat federal. Di dalam federal law, korporasi bisa diminta pertanggungjawabannya atas tindakan illegal yang dilakukan oleh pegawai korporasi apabila dapat dibuktikan (1) perbuatannya berada dalam lingkup tugasnya dan (2) perbuatannya memiliki tujuan untuk memberi keuntungan terhadap korporasi. Sedangkan di state criminal law, terdapat pendekatan yang berbeda dalam hal mempidana korporasi. Di beberapa Negara bagian telah menggunakan Model Penal Code, yakni peraturan yang menyatakan korporasi dapat bertanggung jawab tidak hanya menggunakan *vicarious liability*.

Jenis sanksi yang diberikan kepada korporasi oleh Amerika Serikat adalah pidana denda serta hukuman lain yang bersifat moneter (restitusi dan remediasi),

---

<sup>17</sup> Edward B. Diskant, **Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure**, The Yale Law Journal, (Vol 118: 126, 2008), hlm. 139.

hukuman non moneter, hukuman yang bergantung pada putusan hakim, sanksi perdata dan administrasi serta dalam beberapa kasus, hukum reputasional.<sup>18</sup>

Selain Amerika Serikat, Korporasi di Inggris merupakan subyek hukum pidana yang didefinisikan dalam Companies Act Chapter 46 yang berbunyi korporasi ialah perusahaan public atau privat dengan pertanggungjawaba terbatas dan tidak terbatas. Di Inggris, korporasi adalah badan hukum, dan secara pidana dapat dituntut atau bertanggung jawab meskipun tidak memiliki wujud fisik dan tidak dapat bertindak atau berpikir kecuali karyawan serta dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana berdasarkan *vicarious liability* untuk *strict liability offences* sama halnya dengan pertanggungjawaban terhadap manusia. Pertanggungjawaban pidananya pun dapat mencakup tanggung jawab langsung atau direct liability atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau orang yang diidentifikasi dengan ini, yaitu *identification doctrine*.

Berdasarkan hukum pidana Inggris, baik korporasi itu sebagai pelaku maupun turut serta dalam tindak pidana, korporasi tetap bertanggungjawab secara pidana serta para pejabat dalam korporasi itu dapat diminta pertanggungjawaban oleh ketentuan perundang-undangan seperti Betting Gaming and Lotteries Act 1963 section 53. Maka dari itu, apabila suatu korporasi telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, baik dengan persetujuan atau dengan sengaja dibiarkan terjadi oleh korporasi atau dapat juga dikaitkan dengan kelalaian oleh direktur, manajer, sekretaris, atau pejabat lain pada tingkat yang sama dalam korporasi maka korporasi itu harus dinyatakan bersalah.

Di Negara-negara Anglo Saxon menggunakan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yaitu:

a. Doktrin pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

*Vicarious liability* adalah teori tanggungjawab seseorang atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain atau dapat disebut teori tanggungjawab pengganti. Artinya *vicarious liability* yaitu seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas dirinya sendiri

---

<sup>18</sup> Jennifer Arlen, **Corporate Criminal Liability: Theory and Evidence**, University Law and Economic Working Papers, New York, 2011, hlm. 5.

melainkan bertanggungjawab pula terhadap orang lain. Teori ini dianut dalam hukum perdata namun oleh hukum pidana menolak teori *vicarious liability* karena seseorang hanya bertanggungjawab terhadap perbuatannya sendiri dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain.

b. Doktrin pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Pengertian dari strict liability atau teori tanggungjawab mutlak adalah pelaku yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana apabila pelaku tersebut telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tanpa melihat dari sikap batinnya. Artinya strict liability adalah pertanggungjawaban bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya.

c. Doktrin pertanggungjawaban Identifikasi

Teori identifikasi merupakan alternatif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi yang bersumber pada asas kesalahan yang mengharuskan pembuktian unsur kesengajaan dan kelalaian. Teori identifikasi ini menjelaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum yang berkehendak dan berbuat melalui manusi, dan oleh karena itu tindakan pejabat korporasi merupakan perbuatan korporasi, sehingga pejabat korporasi dalam menjalankan usaha merupakan tindakan dan kesalahan korporasi, sehingga korporasi sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana. Di Inggris masalah pembedaan korporasi telah berkembang, Celia Wells dalam bukunya *Corporations and Criminal Responsibility*, menyatakan sanksi untuk korporasi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>19</sup>

(1) Financial Sanction

Financial sanction merupakan jenis pidana yang dianggap tepat dan dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Dalam pelaksanaannya juga menimbulkan masalah yaitu apabila tidak dapat dibayar oleh korporasi maka tidak akan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan. Pembatasan terhadap pembayaran denda hanya dibatasi atau diambil dari harta kekayaan korporasi itu sendiri.

---

<sup>19</sup> Celia Wells, **Corporation And Criminal Responsibility**, Clarendon Press, Oxford, 1994, hlm. 31, 33, 36.

## *(2) Nonfinancial Sanction*

*Nonfinancial Sanction* ini berupa:

- a. *Probation* (percobaan);
- b. *Adverse publicity* (publisitas yang merugikan);
- c. *Community service* (pelayanan masyarakat);
- d. *Direct compensation orders* (Kompensasi Langsung);
- e. *Punitive injunction* (hukuman perintah).

## **3. Pengaturan Pidana Terhadap Korporasi Di Indonesia Saat Ini Dan Konsep Pengaturan Pidana Di Massa Mendatang**

Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berdasarkan Pasal 20 ayat 7 UU PTPK adalah berupa pidana denda. Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam UU PTPK masih belum berdiri sendiri atau dapat dikatakan masih merujuk aturan yang ditujukan terhadap pelaku tindak pidana orang atau manusia dan selain itu pemidanaan terhadap korporasi pun sulit untuk dilakukan sehingga meskipun terdapat aturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan pemidanaan. Akibat tidak jelasnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi maka yang sebenarnya korporasi tersebut melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, oleh karena tidak adanya aturan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sehingga banyak hakim yang lebih memilih menjatuhkan putusannya ditujukan kepada pengurus (direktur) beserta karyawannya yang terlibat melakukan tindak pidana. Tindakan tersebut sebenarnya sangat merugikan Negara, sehingga pengaturan mengenai pemidanaan terhadap korporasi sangat diperlukan.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sangat diperlukan dalam rangka untuk mencapai suatu ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu dalam teori pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Didalam teori pemidanaan terdapat beberapa teori yang memiliki karakteristik tujuan serta fungsi tentang pemidanaan, seperti teori

relative atau teori tujuan yang terkait dengan pengaturan mengenai pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini.

Teori relative atau teori tujuan ini memiliki tujuan untuk mencegah agar pelaku tindak pidana tidak melakukan kejahatan dengan cara menakut-nakuti pelaku dengan suatu aturan. Apabila dikaitkan dengan Pasal 20 ayat 7 UU PTPK saat ini sangat sesuai dengan teori relative dan teori tujuan yaitu dalam UU PTPK hanya mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, namun dalam UU PTPK tidak mengatur mengenai bagaimana cara pelaksanaannya.

Pengaturan pidana denda terhadap korporasi dalam UU PTPK sebenarnya memiliki tujuan yang baik yaitu untuk mencegah korporasi agar tidak melakukan tindak pidana korupsi namun timbul permasalahan ketika korporasi beserta pelaku-pelaku yang ada didalam korporasi tersebut tidak merasa takut untuk melakukan tindak pidana korupsi sehingga dalam pelaksanaannya timbul permasalahan mengenai bagaimana agar korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana. Hal ini tentunya mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan yang akan dilakukan oleh hakim dan jaksa. Akibat tidak diaturnya pelaksanaan mengenai pidana denda terhadap korporasi, maka sesuai pasal 103 KUHP pelaksanaannya harus merujuk kembali pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun didalam KUHP tidak mengatur mengenai sanksi maupun pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi. Yang diatur di dalam Pasal 30 ayat 2 KUHP hanya mengatur mengenai sanksi pidana denda dan alternatif dari sanksi pidana denda yang ditujukan terhadap subyek hukum orang atau manusia.

Konsep aturan mengenai eksekusi pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi adalah Pertama : Korporasi dapat melakukan pembayaran pidana denda dengan cara mencicil, selama proses pelaksanaan tersebut berlangsung untuk sementara waktu korporasi dilakukan penutupan sampai proses pembayaran selesai; Kedua: Apabila korporasi tidak melaksanakan ketentuan pada tahap pertama maka penegak hukum dapat melakukan eksekusi berupa perampasan terhadap harta

kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi; Ketiga: Apabila kedua tahapan tersebut tidak dilaksanakan oleh korporasi, maka korporasi tersebut dapat dilikuidasi.

### **Simpulan**

Dari hasil pembahasan tesis ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum dalam pengaturan penjatuhan pidana denda terhadap korporasi yang menjamin kepastian hukum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini terbagi menjadi 2 (dua) permasalahan hukum, yaitu:

- 1) Permasalahan Yuridis

Permasalahan terhadap pelaksanaan pidana denda dipengaruhi oleh adanya suatu daya paksa dari suatu peraturan perundang-undangan atau dapat disebut dengan permasalahan yuridis. Permasalahan yuridis adalah permasalahan yang muncul terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri, yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Permasalahan Sosiologis.

Permasalahan mengenai pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi tidak hanya terkendala masalah yuridis saja melainkan juga terkendala masalah sosiologis. Permasalahan tersebut didasarkan atas jaranganya hakim menerapkan pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Adapun permasalahan-permasalahan teknis dari pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. tidak adanya niat dari korporasi untuk melaksanakan pidana denda;
- b. korporasi tidak melaksanakan pidana denda dalam tindak pidana korupsi adalah tidak mencukupinya harta kekayaan yang dimiliki oleh suatu korporasi untuk membayar denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

2. Konsep pengaturan penjatuhan pidana denda terhadap korporasi yang menjamin aspek kepastian hukum dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang, penulis

melakukan perbandingan terhadap beberapa Negara Eropa Kontinental dan Negara-negara Anglo Saxon, yaitu:

Pengaturan penjatuhan pidana denda terhadap korporasi Negara Eropa Kontinental seperti, Belanda, Yugoslavia, Korea dan Thailand.yaitu sistem pembayaran pidana denda dapat dilakukan secara mencicil dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan dan apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan pelaku tidak melaksanakan pembayaran pidana maka jaksa selaku eksekutor dari putusan pidana dapat melakukan penyitaan barang dan perampasan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh korporasi tersebut. Pengaturan penjatuhan pidana denda terhadap korporasi di Negara-negara yang menganut system hukum Anglo Saxon, seperti Amerika dan Inggris dilakukan dengan melakukan perampasan harta kekayaan apabila korporasi tidak melaksanakan pembayaran pidana. Dan pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan pun tidak hanya ditujukan kepada korporasinya saja melainkan juga dapat dikenakan kepada pengurusnya atau bahkan pengurus serta korporasinya. Konsep aturan mengenai eksekusi pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi adalah Pertama : Korporasi dapat melakukan pembayaran pidana denda dengan cara mencicil, selama proses pelaksanaan tersebut berlangsung untuk sementara waktu korporasi dilakukan penutupan sampai proses pembayaran selesai; Kedua: Apabila korporasi tidak melaksanakan ketentuan pada tahap pertama maka penegak hukum dapat melakukan eksekusi berupa perampasan terhadap harta kekayaan dari hasil

tindak pidana korupsi; Ketiga: Apabila kedua tahapan tersebut tidak dilaksanakan oleh korporasi, maka korporasi tersebut dapat dilikuidasi.



## DAFTAR PUSTAKA

Celia Wells, 1994, **Corporation And Criminal Responsibility**, Clarendon Press, Oxford.

Edward B. Diskant, 2008, **Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure**, Volume 118-126, The Yale Law Journal.

Harprileny Soebiantoro, 2004, **Eksistensi Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Media Hukum, Jakarta.

Jennifer Arlen, 2011, **Corporate Criminal Liability: Theory and Evidence**, New York University Law and Economic Working Papers.

Mardjono Reksodiputro, 1982, **Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi, Kertas kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi**, Binacipta, Bandung.

Muladi, **Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana**, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi.

### Naskah Internet

Mahkamah Agung, **Pidana\_04\_PID.SUS\_2011\_PT.\_BJM\_(PENGADILAN\_TIPIKOR)**,  
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/973122044ba228dabf030c2e7eb128a3>.

Mahkamah

Agung,

**812/PID\_SUS/2010/PN.BJM,**

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9918b5c5a0328019072a212e01279748>.

B.F Keulen dan E. Gritter, **Corporate Criminal Liability in Netherlands,**

<http://www.ejcl.org/143/art143-9.pdf>.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang **Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

**Eksekusi Pidana Denda Terhadap Korporasi  
Dalam Tindak Pidana Korupsi**

**JURNAL**



**Oleh:  
Munajat Intansasmita  
136010100111014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2015**